

ABSTRAKSI

Hutang piutang seringkali terjadi di masyarakat terutama hutang piutang antara perseorangan, seseorang meminjam uang dengan jaminan sertipikat tanah kepada orang lainnya. Pada umumnya seorang kreditur dan debitur membuat Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan dan dibuatkan pula Akta Pemberian Hak Tanggungan yang apabila sewaktu-waktu debitur ingkar janji (*wanprestasi*) maka akan ditempuh melalui proses lelang, akan tetapi masih banyak terjadi penyimpangan proses hukum di mana kreditur dan debitur tadi membuat perbuatan hukum lain, yakni Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang disertai dengan Kuasa Menjual. Dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tadi maka proses pelunasan hutangnya dilakukan dengan cara proses Jual Beli, ini menyalahi aturan hukum. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tidak boleh menjadi kamufase ataupun motif sebagai pelunasan atas perjanjian hutang piutang tersebut. Tesis ini mengkaji lebih dalam mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang. Dari penelitian inilah diambil kesimpulan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang disertai Kuasa Menjual proses mekanismenya berbeda dengan proses Perjanjian Hutang Piutang maupun dengan Akta Jual Beli. Yang masing-masing proses mekanisme hukumnya mempunyai peraturan yang berbeda-beda.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hutang Piutang, Jual Beli.